



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI MESELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH PADA  
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU  
KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**DEDI KURNIAWAN**

**NIM : 11521103979**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAU  
PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul **“Tradisi Maselle Aseng Ketika Akat Nikad Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjau Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh :

Nama : Dedi Kurniawan

Nim : 11521103997

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Januari 2021**

**Pembimbing Skripsi**

**SYUKRAN, M. Sy**

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TRADISI MESELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DEDI KURNIAWAN**  
 NIM : 11521103979  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 6 Agustus 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SHL, MA**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, M.A**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Judul: Tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau menurut hukum Islam**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *maselle aseng*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *maselle aseng*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, angket, dokumentasi, serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 70 orang. Namun karena banyaknya populasi dan keterbatasan penulis untuk meneliti semua populasi tersebut, maka penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 2 orang *maselle aseng* ketika akad nikah, 2 orang yang tidak mau *maselle aseng*, 2 orang *sandro*, orang tua *nasellei asenna anakna* (mengganti nama anaknya) dan 2 tokoh masyarakat, 2 Tokoh adat dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah semua data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analitis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *meselle aseng* adalah tradisi masyarakat bugis yakni sebelum melangsungkan akad nikah (Ijab dan Qabul) para keluarga terlebih dahulu mendatangi para *sandro* (tokoh masyarakat bugis yang dihargai) untuk melihat *dale" gello* (nasib baik) kehidupan rumah tangga calon pengantin tersebut terutama dalam melaksanakan akad nikah yang dimulai dengan nama calon mempelai wanita dan laki-laki. Apabila nama tersebut menurut *sandro* akan mendatangkan *dale" konjak* (nasib buruk) maka *sandro* tersebut akan *maselle aseng* (mengganti nama) calon mempelai yang diduga akan mendatangkan *dale" konjak* (nasib buruk) dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Tetapi perubahan nama tersebut hanya dilakukan ketika akad nikah (Ijab dan qabul) saja. Proses ini dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah, atau setelah dilakukan proses adat sebelum menikah yakni *mependre doi*". Tradisi *meselle aseng* dalam hukum Islam terdapat dalam konsep *urf*" dimana tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sudah berjalan lama dan ajeg dalam masyarakat tentunya bentuk dari kearifan lokal masyarakat bugis di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh. Tradisi ini dalam hukum Islam adanya hal yang bertolak belakang, karena pelaksanaannya adanya penyelewengan dari syariat Islam yakni adanya peramalan nasib kedepannya dan bertentangan dengan keyakinan sesungguhnya rejeki dan musibah segalanya telah diatur dan sesuai dengan kehendak oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan siapapun, termasuk *sandro*.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin wa bihi nasta'ain 'ala umurid dunya wad din assholatu was salamu 'ala asyrofih ambiya wal mursalin wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis senantiasa di berikan kekuatan kesehatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya islam di muka bumi ini penerang dalam kegelapan serta penyelamat dalam kesesatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TRADISI MESELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**. sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda Muhammad Abbas dan Ibunda Naidah, kemudian kepada kakakku Asnida, Adikku Sifa Tabita yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasihat, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus yang takkan pernah terganti hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aku selalu kuat menjalani setiap rintangan dan hambatan, kemudian terima kasih kepada Nadia Edelwais Filasufiah sebagai partner terbaik yang selalu memberikan support serta dukungan dan doa, yang tak pernah henti memberikan arahan yang selalu menemani di kala sulit dan selalu hadir di kala di butuhkan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Ayah dan Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan ku untuk membalas semua pengorbananmu. Terima kasih juga buat keluarga besar dan keluarga tercinta kakak dan adik-adik ku tersayang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Syukran, M. Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis serta memberikana bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.
9. Sahabat-Sahabat Penulis yang paling istimewa dari Awal Perkuliahan Riswan Hasibuan S.H, Muhammad Anas Fadholi S.H , Randy Herwinda S.H, Dedet Dwi Nata S.H, Asep Mahfudz S.H, Muhammad Taufik S.H, Pauzan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 lokal C
11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan dapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari skripsi ini serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wr*

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

Penulis,

**(DEDI KURNIAWAN)**

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Massele aseng pada Masyarakat Suku Bugis dikelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh .....</b>	<b>62</b>
---	-----------

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT PENULIS**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia, pria dan wanita, dengan sifat fitrah yang khas. Manusia memiliki naluri, perasaan, dan akal. Adanya rasa cinta kasih antara pria dan wanita merupakan fitrah manusia. Hubungan khusus antar jenis kelamin antara keduanya terjadi secara alami karena adanya *gharizaton nau*" (naluri seksual/berketurunan). Sebagai sistem hidup yang paripurna, Islam telah sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya Islam tidak melepaskan kendali naluri seksual secara bebas yang dapat membahayakan diri manusia dan kehidupan masyarakat.

Islam telah membatasi hubungan khusus pria dan wanita hanya dengan pernikahan. Dengan cara begitu terwujud kondisi masyarakat penuh kesucian kemuliaan, menjaga kehormatan setiap anggotanya, dapat mewujudkan ketenangan hidup, dan meneruskan keturunan umat manusia.

Salah satu keinginan utama bagi pasangan yang menikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*. Secara manusiawi, keluarga sakinah merupakan suatu yang dicita-citakan setiap orang, baik yang telah menikah atau yang belum. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami-isteri, baik yang baru maupun yang telah lama membangun rumah tangga.<sup>1</sup>

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam, *Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Mas, 2005), hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah SWT (bernilai ibadah). Tujuannya untuk membentuk keluarga yang *sakînah* tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Dalam Al-Qur‘an surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang *berfikir*.

Pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah.<sup>2</sup> Mewujudkan keuarga sakinah bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk meraihnya, bukan pula perkara mudah. Ia membutuhkan ikhtiar (usaha) yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapakan keridhaan Allah SWT.

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>3</sup>

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau

<sup>2</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), hal. 10

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hal.45-46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'at dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itu pun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>4</sup> Berikut rukun dan syarat nikah yakni :

#### 1. Rukun nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

#### 2. Syarat-syarat rukun nikah

Secara rinci rukun-rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

#### a. Calon Mempelai

##### 1) Calon mempelai laki-laki

<sup>4</sup>Gemala dewi , dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005) hal.49-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijihad para ulama yaitu :

- a) Calon suami beragama Islam
  - b) Terang ( jelas ) bahwa calon suami itu betul laki-laki
  - c) Orangny diketahui dan tertentu
  - d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
  - e) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
  - f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu
  - g) Tidak sedang melakukan ihram
  - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - i) Tidak sedang mempunyai istri empat. ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1).<sup>5</sup>
- 2) Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

- a) Beragama Islam.
- b) Wanita itu tentu orangnya
- c) Halal bagi calon suami
- d) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- e) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)

---

<sup>5</sup> Ibid., hal.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Tidak dalam ihram haji atau umrah.<sup>6</sup>

b. Wali nikah

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah.<sup>7</sup> Berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya : “Tidak sah pernikahan tanpa wali”

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

- 1) Bapak
- 2) Kakek dan seterusnya keatas
- 3) Saudara laki-laki sekandung/seayah
- 4) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
- 6) Paman sekandung/seayah
- 7) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- 8) Saudara kakek
- 9) Anak laki-laki saudara kakak

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu :

- 1) Wali *mujbir* yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.
- 2) Wali *nasab* yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara laki-

<sup>6</sup> Ibid., hal.55

<sup>7</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1992), hal.602

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.

3) Wali hakim<sup>8</sup>

c. Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.<sup>9</sup>

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah.

d. Ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganitn laki-laki atas ijab calon penganutin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.<sup>10</sup> Perkawinan wajib ijab dan Qabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 603

<sup>9</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hal. 604

<sup>10</sup> Gemala Dewi, dkk, *op. cit.*, hal.63



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat mazhab Hanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan qabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Mazhab Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah.

Namun yang terjadi di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terdapat tradisi masyarakat bugis yakni sebelum melangsungkan akad nikah (Ijab dan Qabul) para keluarga terlebih dahulu mendatangi para *sandro*<sup>11</sup> untuk melihat *dale" gello* (nasib baik) kehidupan rumah tangga calon pengantin tersebut terutama dalam melaksanakan akad nikah yang dimulai dengan nama calon mempelai wanita dan laki-laki. Apabila nama

<sup>11</sup> Tokoh adat masyarakat suku Bugis yang sangat dihargai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menurut *sandro* akan mendatangkan *dale'' konjak* (nasib buruk) maka *sandro* tersebut akan *maselle aseng* (mengganti nama) calon memepelai yang diduga akan mendatangkan *dale'' konjak* (nasib buruk) dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Tetapi perubahan nama tersebut hanya dilakukan ketika akad nikah (Ijab dan qabul) saja. Apabila calon pengantin atau orang tua tersebut tidak bersedia mengganti nama mereka ketika akad nikah maka para tokoh adat tidak merestui hubungan perkawinan tersebut sehingga para keluarga juga akan memutuskan hubungan keluarga (anggota keluarga yang tidak mengikuti tradisi *meselle aseng* hal tersebut karena tidak taat kepada *sandro* sebagai orang yang sangat dihargai oleh masyarakat suku Bugis), bahkan mereka juga akan dikenakan bentuk pelanggaran pada norma adat istiadat, yakni sanksi yang akan diberikan ialah bentuk pengucilan dari masyarakat bahkan diusir dan di putuskannya hubungan kekeluargaan antara anak dan orangtua, bagi anak yang tidak melaksanakan tradisi *meselle aseng* tetap bersikeras jika tidak mengikuti saran dari *sandro* tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi Maselle Aseng Ketika Akad Nikah Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Hukum Islam.**

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan serta titik tolak masalah-masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau menurut hukum Islam. dari tahun 2016 s/d 2020.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara baik.

Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat lebih meningkatkan penguasaan dalam perkawinan menurut tuntunan agama Islam.

### b. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal layak serta valid perlu disusun rangkaian metode yang akan di jadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat suku Bugis Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan tradisi maselle aseng ketika akad nikah masyarakat suku bugis di kelurahan pulau kijang kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir ditinjau menurut hukum islam.

### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat suku Bugis Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 70 orang. Namun karena banyaknya populasi dan keterbatasan penulis untuk meneliti semua populasi tersebut, maka penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 2 orang *maselle aseng* ketika akad nikah, 2 orang yang tidak mau *maselle aseng*, 2 orang sandro, orang tua *nasellei asenna anakna* (mengganti nama anaknya) dan 2 tokoh masyarakat, 2 Tokoh adat dengan menggunakan tehknik *purposive sampling*

### 5. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena ini penelitian lapangan, maka penulis mendapatkan data langsung dari responden di lokasi penelitian dan objek penelitian.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup>

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumberdata yang diperoleh dari bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literature-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung atau suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.<sup>14</sup>
- b. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.
- c. Angket yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- d. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada seperti foto, catatan-catatan penting, dan lain sebagainya.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, hal. 197

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka, berupa buku, jurnal atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**7. Teknik Analisis Data**

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain kemudian menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas masalah yang diteliti dan diambil suatu kesimpulan.

**8. Teknik Penulisan**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif yaitu mencari data yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi bersifat umum.
- b. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap masalah-masalah mengenai penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi atas lima bab yang semuanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Di dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis daerah, keadaan penduduk, mata pencahariannya, serta adak kebiasaan masyarakat yang akan diteliti.

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Berisi tinjauan umum pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, syarat-syarat dalam ijab qabul dan konsep URF.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari pembahasan tentang pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi *maselle aseng* masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Pulau Kijang

Nama Kecamatan Reteh Berasal dari nama sebuah sungai yakni Sungai Reteh yang memiliki 2 (dua) muara. Muara pertama terletak di perbatasan Kelurahan Sanglar dengan Kelurahan Pulau Kecil yang sekarang sebutannya parit 20 atau Reteh Lama. Muara kedua terletak diperbatasan Kota Baru dengan Kota Sebrida. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sungai Reteh itu sendiri berasal dari kata “letih” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tak bertenaga capek setelah bekerja atau melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi kata Reteh.<sup>15</sup>

Sebagian besar lagi mengatakan bahwa Reteh berasal dari Sereth. Seret yaitu nama sebuah kampung di wilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui Sungai Gangsal akibat peperangan ke sebuah pemukiman di sungai yang belum diketahui namanya sehingga mereka namakan sungai tersebut asal nama kampung mereka yakni Serith yang kemudian menjadi Reteh.

Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang. (cikal bakal Kesultanan Indragiri). Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang berkedudukan di Kota Raja (Rengat). Daerah kekuasaan Kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan, Tempuling, Sungai Luar, Anak Serkaden Enok. Sedangkan Reteh, Igal dan Mande diserahkan oleh

<sup>15</sup> Dokumentasi, Data di Kantor Kelurahan Pulau Kijang, 3 september 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan sebagai pejabat yang menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 7 Januari 1883 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja Lung dengan gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai pengusaha di wilayah Reteh., Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad Syah.

Sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1858 Reteh berada di bawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) dengan pusat pemerintahan terletak di Kemuning. Pada tanggal 7 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan Belanda dalam pertempuranya di Kelurahan Benteng.

Kerajaan Bintan kemudian dibubarkan berdasarkan Stbl. 19 jo 190 tgl. 1-3-1913. Dengan bubarnya Kerajaan Bintan, diutuslah pejabat dari Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir (sekarang Camat) ke wilayah Reteh yaitu berturut-turut dari Raja Brine, Raja Usman, Raja Rafuh, Tengku Dut, Raja Nung bin Ja'far, Raja Maksum, Raja Cik dan Raja Husen.

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amir Reteh diangkat dengan keputusan Presiden yaitu:<sup>16</sup>

1. Raja Hasan 1916-1917
2. Nursiwan 1917-1918
3. Sultan Palembang 1918-1932
4. Sidik 1932-1933
5. Mohd. Samin 1933-1935
6. Mohd Zein 1935-1937
7. Mohd. Sirin 1937-1939
8. Bismarak 1939-1941

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai dengan tahun 2006, terjadi pemekaran di Kecamatan Reteh hingga terbentuk beberapa kecamatan seperti Kecamatan Keritang. Kemudian Keritang mekar lagi menjadi Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 Kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan Sungai Batang. Dengan demikian seluruh wilayah Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat) bagian wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 Kelurahan dan 4 Kelurahan, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau Kijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam dan Sungai Undan.<sup>17</sup>

Kelurahan Pulau Kijang berdiri pada tahun 1981 tepatnya 1 Juli 1981. Sejak berdirinya Pulau Kijang sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Kepala Kelurahan yang pertama kali menjabat sebagai kepala kelurahan Pulau Kijang yaitu Ahmad Abdullah masa pada tanggal 1 Juli 1981-18 Februari 1989. Setelah masa Jabatan Ahmad Abdullah berakhir maka digantikan oleh Muhammad Thaib yang masa jabatannya dimulai dari 1 Februari 1989 - 12 Oktober 1991. Mohd Thair Thaib menjabat sebagai kepala kelurahan lebih kurang 2 tahun dan digantikan oleh Mohd Noer OE dan masa jabatannya lebih kurang yaitu 12 Oktober - 20 April 1995. Setelah masa jabatannya berakhir maka digantikan oleh A. Rasyid, AMP dan digantikan oleh Maspun Thaib setelah itu digantikan oleh Hardiansyah.

---

<sup>17</sup> Ibid.

Pada masa kepemimpinannya kantor tidak lagi berada di jalan Kelurahan melainkan telah dipindahkan ke jalan Sunan Gunung Jati Pulau Kijang dan sampai saat sekarang ini yang memegang jabatan sebagai Kepala Kelurahan adalah Ilhamzah.

## B. Kondisi Geografis

Sedikit pemandangan Pulau Kijang dari perairan saat naik speed boat letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104 10" Bujur Timur – 102 32" Bujur Timur 0 36" Lintang Utara – 10 07" Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 1.160,597 Hektar. Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2,300 Milimeter.

### 1. Letak dan Luas Wilayah

Pulau Kijang merupakan bagian wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Jarak tempuh transportasi darat dari Kelurahan Pulau Kijang ke Ibu Kota Kabupaten 90 Kilometer, sedangkan ke Ibu Kota Provinsi 360 Kilometer jarak tempuh Kelurahan Pulau Kijang ke Provinsi 350 Kilometer, sedangkan luas wilayah Kelurahan Pulau Kijang 11.050 Kilometer.

### 2. Keadaan Alam

Kecamatan Reteh merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa. Palawija dan hultikultural, berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Iklim

Curah pada bulan September sampai dengan bulan Februari rata-rata 186 mm, membuat area sawah tadah hujan di Kecamatan Reteh cukup untuk membuat suburnya tanaman tersebut. Pergantian musim hujan ke musim kemarau lahan sawah beralih berfungsi kepada lahan kedelai, jagung dan semangka. Didaerah pesisir, pada musim Barat adalah saat yang dinantikan-nantikan oleh para nelayan diman produktifitas udang dan ikan meningkat sampai melebihi kebutuhan pasar. Sehingga hasil surplus ikan dan udang dipasarkan di Kuala Tungkal.

### C. Jumlah Penduduk

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk Di Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	8.834	49.2%
2	Perempuan	8.837	50.8%
	<b>Jumlah</b>	17.671	100%

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang<sup>18</sup>

Jumlah penduduk di Pulau Kijang berjumlah 17.671 jiwa. Laki-laki berjumlah 8.834 orang (49,2%), dan perempuan berjumlah 8.837 orang (50,8%). Masyarakat Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogen, di mana daerah ini di huni berbagai suku bangsa. Penduduk Pulau Kijang terdiri dari berbagai suku bangsa antar lain:

<sup>18</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.2**

**Jumlah Penduduk Di Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa**

No	Suku Bangsa	Jumlah	Presentase
1	Suku Bugis	5.301	35%
2	Suku Melayu	3.534	20%
3	Suku Banjar	3.004	17%
4	Suku Jawa	2.650	15%
5	Suku Minang	1.413	8%
6	Suku Batak	530	3%
7	China	350	2%

*Sumber data: Kantor Dasa Pulau Kijang*

Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya berakibat pada beraneka budaya ibu yang sulit untuk dipisahkan pada setiap suku bangsa. Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam wadah Pulau Kijang selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, selalu dihargai, serta senantiasa membaaur dalam suatu budaya baru dengan bercirikan Budaya Adat Melayu.

**D. Mata Pencaharian**

Mata pencaharian di Kelurahan Pulau Kijang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan di Pulau Kijang tanahnya yang cukup luas yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 800 Hektar, jagung 02 Hektar, sayuran 65 Hektar. Kemudian bidang perkebunan yaitu kelapa 7.674 hektar, kopi 23 hektar. Dan bidang peternakan yaitu sapi 150 ekor dan kambing 200 ekor.

**Tabel II.3**

**Perkebunan di Kelurahan Pulau Kijang**

No	Jenis Tanaman	Jumlah Lahan Produksi
1	Padi	800 Hektar
2	Sayuran	65 Hektar
3	Kelapa	7,674 Hektar
4	Kopi	23 Hektar

*Sumber data : Kantor Pulau Kijang September tahun 2020*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.4**  
**Komposisi Mata Pencharian di Kelurahan Pulau Kijang**

No	Jenis Pekerjaan	Peresentase
1	Petani	30%
2	Perkebun	20%
3	Pegawai negri sipil	10%
4	Pension pegawai negri sipil	5%
5	Pedagang	10%
6	Nelayan	15%
7	Buruh	10%

*Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang September tahun 2020*

Masyarakat Pulau Kijang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 30%, di samping itu ada juga yang bekerja di pemerintahan baik itu Pegawai Negeri Sipil 10% pensiunan Pegawai Negeri Sipil 5%. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai Pedagang 10%, nelayan 15%, buruh 10%.

## E. Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan segala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental) maka sekolah-sekolah maupun swasta yang tergambar dalam bentuk table di bawah ini.

**Tabel II.5**  
**Klasifikasi Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak Sekolah	10%
2	Sekolah Dasar	30%
3	Sekolah Menengah Pertama	20%
4	Sekolah Menengah Atas	40%

*Sumber Data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Januari tahun 2020<sup>19</sup>*

<sup>19</sup> Ibid

## F. Kepegawaian

Pemerintah Kecamatan Reteh berdasarkan kurun waktu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Sejak zaman penjajahan, Reteh dibawah kekuasaan Kerajaan Keritang. Setelah berdirinya Kesultanan Indragiri Reteh diserahkan ke Kerajaan Bintan, dengan runtuhnya Kerajaan Bintan Reteh dibawah Residen.
2. Zaman penjajah, kepala pemerintahan dengan sebutan Amir dalam sejarah Kecamatan Reteh tercatat 16 Amir/Camat.
3. Zaman kemerdekaan, kepala Pemerintahan di Kecamatan Reteh dipimpin oleh seorang Camat, sampai tahun 2019

Pada akhir tahun 2019 pemerintah Kecamatan Reteh di bawah pimpinan seorang Camat, pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya di Kecamatan Reteh berjumlah 434 orang. Tentara Nasional Indonesia 4 orang, Kepolisian berjumlah 20 orang. Pegawai Kontrak dan Honorer 185 orang. Rincian Pegawai yang bertugas di Kecamatan Reteh sebagaimana dimuat dalam data-data table di bawah ini.

**Tabel II.6**  
**Jumlah Pegawai Kantor Yang Berada Di Kecamatan Reteh**

No	Instansi	Jumlah Pegawai		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Kantor Kecamatan Reteh	10	20	12
2	Kantor Kepolisian Sektor Reteh	20	-	20
3	Kantor Komando Daerah Militer 07 Reteh	4	-	4
4	Kantor Lurah Pulau Kijang	3	2	5
5	Kantor Urusan Agama	4	1	5
6	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga	172	224	396
7	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Pertanian Peternakan	7	1	8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Instansi	Jumlah Pegawai		
		Pria	Wanita	Jumlah
8	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perhubungan	3	-	3
9	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Kesehatan	14	15	29
10	Kantor Unit Pembantu Daerah Teknis Kesehatan	17	1	18
11	Kantor Unit Pembantu Daerah Teknis Dinas Pendapatan Daerah	2	1	1
12	Kantor Unit Pembantu Daerah Teknis Daerah Prikanan dan Kelautan	1	-	1
13	Kantor Pos Bea Dan Cukai	1	-	3
14	Kantor Syahbandar	3	-	3
15	Unit Pembantu Teknis BKCKB	-	3	1
16	Mantra Statistik	1	-	3
17	Kantor Perpustakaan	2	1	2
18	Petugas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Dan Prasarana Wilayah	2	-	5
19	Bank Rakyat Indonesia Unit Pulau Kijang	4	1	2
20	Perseroan Terbatas Pos Indonesia	2	-	1
21	Perseroan Terbatan Persero Perusahaan Listrik Negara	6	2	8
22	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri	2	-	2
23	Kepala Kelurahan	9	-	9
24	Perangkat Kelurahan	82	6	87
Jumlah		371	259	630

Sumber Data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang

## G. Agama

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. Di kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reth seluruh suku Bugis menganut kepercayaan agama islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.7**  
**Jumlah Suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	5.301	100%

*Sumber data: Kantor Dasa Pulau Kijang<sup>20</sup>*

<sup>20</sup> *Ibid*

## A. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>21</sup>

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu **انكاح** adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>22</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan

<sup>21</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (PT. RajaGrafindo Jakarta, 2014), hal. 7

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>23</sup>

Adapun menurut syariat, nikah juga dapat diartikan sebagai akad, Dalam literature *fiqh* kata nikah berasal dari bahasa arab disebut juga dengan dua istilah yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج). Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah an-Nissa ayat 3 ;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (An-Nissa : 3)<sup>24</sup>

Para ulama *fiqh* ke empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) pada umumnya mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dengan akad) *lafazh* nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut ahli *fiqh*, menurut golongan Hanafiah, nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya . menurut Malkiyah nikah

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1997), hal 62

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Symsl Al-Qur'an, 2012) cet ke-1, hal. 198

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh „ala Madzahib al-Araba"ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) Jilid IV, hal 212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha'`, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya. Sedangkan menurut golongan Hanabaliyah mendefinisikan nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>26</sup>

Sejalan dengan pendapat diatas bahwasannya pernikahan adalah sebuah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam satu akad dengan bentuk penyerahandari pihak pertama dan penerimaan dari pihak kedua, dengan kata lain proses ijab qobul.<sup>27</sup> Dalam hal ini, proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan adanya perjanjian dan serah terima yaitu wali dari mempelai perempuan menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang akan menjadi suami perempuan tersebut dan mempelai laki-laki menerima perempuan tersebut untuk dijadikannya sebagai istri.

UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut, pernikahan mengandung hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hal pergaulan yang dilandasi

<sup>26</sup> Ibid., hal. 3-4

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 6

<sup>28</sup> UU RI NO. 1 Tahun 1974 Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolong menolong. Karena dalam pernikahan termasuk pelaksanaan ibadah maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan ridha Allah swt.<sup>29</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Jika dilihat dari perspektif historisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.<sup>31</sup>

Dalam at-Tanzil al-Hakim, perkawinan disebutkan dalam dua

<sup>29</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Cet. 1; Praparae: CV. Kaffah Learning Center, 2019), hal. 5

<sup>30</sup> Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2010, hal 344

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab tantangan yang Terus Berkembang)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006, hal 145

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (miḥwār al-,alaqah al-jinsiyyah) seperti dalam firman Allah: "...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas" (Qs. Al-Mu‘minun (23): 5-7).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۚ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."*

Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (miḥwār al-,alaqah al- insāniyyah al-ijtimā‘iyyah), seperti dalam firman-Nya: (Qs. An-Nahl [16]: 72);

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu"*

Firman Allah SWT dalam (Qs. Al-Furqan [25]: 54);

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal seabgian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Qs. An- Nisa” [4]: 20-21).

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبَيَّنَّا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kam? akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat alMu”minun. Kami menemukan bahwa dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan milk al-yamīn. Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual. Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami iatri dan antara milk alyamin dari kedua jenis (laki- laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin.<sup>32</sup>

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah „sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan“. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akanterjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam.

Pertama, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkn di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menajdi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.

Kedua, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak

<sup>32</sup> Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Elsaq: Yogyakarta, 2004, hal. 434-445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (qaṭʿī). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (ẓannī).

Ketiga, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

Keempat, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah,

Kelima, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.<sup>33</sup>

Hukum perkawinan ada lima:

- a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib
- b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak

<sup>33</sup> Abdul Majid Mahmmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia: Solo, 2005, hal. 9-10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah Sunnah

- c. Haram, bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram
- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin
- e. Mubah, Bagi laki-laki yang tidak terkelurahank alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah.<sup>34</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu.<sup>35</sup>

Undang-undang pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>36</sup>

Maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah

<sup>34</sup> Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal 18-21

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, hal. 11 Lihat juga: Ibu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jil 2 terj, hal. 394-395

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, (Bandung: Sinar Baru, 2010), cet. ke-45, hal. 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan.

a. Syarat-syarat pernikahan

Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab dan qabul.

- 1) Calon mempelai pria
  - a) Beragama islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawina
- 2) Calon mempelai wanita
  - a) Beragama islam
  - b) Wanita Jelas orangnya
  - c) Dapat dimintai persetujuan
  - d) Tidak terdapat halangan.

Antar keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini mengindikasikan bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu tujuan perkawinan.<sup>37</sup>

Adapun syarat wali dalam kitab *Fiqh as-Syafi'i* (terjemahan attandzhib) karya Dr. Mustofa Diibul Bigha adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Mempunyai akal atau tidak gila
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.
- 7) Harus ada pengucapan ijab dan qabul.<sup>38</sup>

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai satu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah dan diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari kedua mempelai
- 3) Memaknai kata-kata menikah *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut
- 4) Antar ijab dan qabul jelas maksudnya

<sup>37</sup> Syayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974), Cet Ke-2, hal.

66

<sup>38</sup> Mustofa Dibbul Bigha, *Fiqh As-Syafi'i*, (Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984), cet.ke-7, hal. 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Orang-orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram umroh
- 6) Majelis ijab qabul dihadiri minimal 4 orang.<sup>39</sup>

Selain beberapa syarat di atas, hukum pernikahan Islam di Indonesia memberikan salah satu syarat dalam perkawinan yakni adanya persetujuan calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka nantinya menjadi mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (2) dikatakan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>40</sup>

b. Rukun-Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dalam pernikahan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>41</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak mempelai wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighad aqad nikah, yaitu ijab qabul, ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan qabul dijawab calon

<sup>39</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, hal. 63

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1990), cet. k-3, hal. 11

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar atau mas kawin
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Imam as-Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin laki-laki
- 3) Calon pengantin perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

a. Calon suami dan calon istri

Syariat menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi calon suami berdasarkan ijtihad.

- 1) Calon beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki
- 3) Orangnya diketahui
- 4) Calon laki-laki jelas halal kawin oleh calon istri
- 5) Calon laki-laki tahu calon istri halal untuk dinikahi
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa)
- 7) Tidak sedang dalam ihram
- 8) Tidak punya istri empat

b. Syarat-syarat calon istri yaitu

- 1) Islam (ahli kitab)
- 2) Jelas bahwa dia wanita bukan *khunsa* (banci)
- 3) Halal bagi calon suami
- 4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- 5) Tidak dipaksa atau ihtiyar
- 6) Tidak dalam keadaan ihram haji.

c. Sighat akad nikah ( ijab dan qabul )

Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus digunakan kata-kata yang dapat mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul, ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Adapun syarat akad nikah adalah:<sup>42</sup>

- 1) Akad harus dimulai dari ijab dan dilanjutkan dengan qabul
- 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus
- 4) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan.
- 5) Ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang jelas dan terus terang tidak boleh menggunakan kata-kata sindiran.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak boleh berselang waktu (pasal 27).
- 2) Akad nikah dilakukan secara sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan dengan orang lain. Pasal 28
- 3) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria

<sup>42</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2004), cet. ke-12, hal.35

<sup>43</sup> Abdull Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), cet. ke-5, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara pribadi.

Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil aqad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal ini mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

d. Mahar (mas kawin)

Mahar adalah pemberian wajib atas suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda atau jasa.<sup>44</sup> Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Hal ini didasari oleh firman Allah swt. Qs. Annisa:4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

e. Wali

Wali secara etimologi berarti penguasa atau pelindung. Menurut

<sup>44</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet ke-7,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah fiqh, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau baran. Sedangkan orang yang diberikan kekuasaan perwalian disebut wali.

Para ulama berbeda pendapat dalam memposisikan wali dalam pernikahan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, wali merupakan syarat sahnya perkawinan.
- 2) Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi dan Az-zuhiri berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sebanding (sekufu) maka pernikahannya boleh.
- 3) Sedangkan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda<sup>45</sup>

Para jumhur ulama sepakat bahwa syarat menjadi wali itu adalah:

- 1) Telah dan dewasa berakal sehat dalam arti anak kecil tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali.
- 3) Muslim.

Hal ini berkenaan dengan firman Allah swt. Surat al-Imran : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ

<sup>45</sup> Slamet Abidin, dkk, *op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ  
الْمَصِيرُ

Artinya: *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”*<sup>46</sup>

- 4) Merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih
- 6) Berfikir baik
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibabt dosa besar atau tidak sering terlibat dosa kecil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram

Sebagaimana rukun-rukun perkawinan diataranya adanya wali dalam perkawinan sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi.

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bis menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.”*

Lantas wali dalam perikahan terbagi menjadi empat macam yakni:

- 1) Wali Nasab, adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan menikah.
  - a) Ayah

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet.t ke-1, hal. 33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kakek
- c) Saudara laki-laki seayah seibu
- d) Saudara laki-laki seayah saja
- e) Anak laki-laki saudara seayah seibu
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- h) Anak laki-laki no. 7
- i) Anak laki-laki no. 8 dst.

#### 2) Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qodi

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

- 3) Wali Maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- 4) Wali Mujbir yaitu wali yang memiliki wewenang langsung untuk menikahkan yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.<sup>47</sup> Menurut madzhab Syafi'i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah berlaku bagi „*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.

<sup>47</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press.2011), cet ke-4, hal. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحنفية قالوا : لاولي الا مجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي او لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبر باجبار الصغير والصغير مطلقا و المجنونة الكبار

Artinya: “Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik dia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”<sup>48</sup>

Menurut madzhab Syafi’i wali *mujbir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Atau wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil ataupun telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah, dan kakek ketika ayah tidak ada<sup>49</sup>

f. Saksi

Akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi menyaksikan akad nikah tersebut, jumhur ulama sepakat saksi adalah rukun nikah.

Artinya: “Dari Abu Musa al Asy’ari berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.

Dalam Al-qur’an dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

<sup>48</sup> Abdurhamman al-Jaziri, *al-Fiqh „al-Madzhib al-„arba“ah*, (Yogyakarta: Pt. Noura, 2001), cet. ke-4, hal. 720

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit*, hal. 400

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”*<sup>50</sup>

Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah:

- 1) Islam
- 2) Berakal, orang gila tidak sah
- 3) Baligh
- 4) Merdeka
- 5) Keduanya mendengar ucapan ijab dan Kabul dari kedua belah pihak.

## B. Konsep Urf

### 1. Pengertian Urf

Secara etimologi „urf berasal dari kata „arafa-ya“rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai „urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai „urf. Artinya,

<sup>50</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet. ke-1, hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

„urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.<sup>51</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, „urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.<sup>52</sup>

Beberapa redaksi kaidah fikih untuk menunjuk kata „urf para ulama usul sering memakai istilah adat, begitupun sebaliknya. Dalam literature fikih terdapat ungkapan “Hâdha tsâbit bi al-„urf wa al-„âdah”, ketetapan ini berlandaskan adat dan „urf. Penyebutan kata „urf setelah kata adat hanya berfungsi sebagai penguat dan tidak mengandung makna berbeda<sup>53</sup> Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian „urf ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata al-„urf adalah sinonim dari kata adat.<sup>54</sup> Pendapat kedua menyatakan bahwa al-„urf lebih umum daripada al-„âdah. Al-„urf mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom.<sup>55</sup> Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada al-„urf. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), 104

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Mas}âdir al-Tasyrî‘ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}s}a Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî‘, Cet. 6, 1993), 147

<sup>53</sup> Abd al-„Aziz Ahmad bin Muhammad al-Bukhari „Alauddin, Kasyf al-Asrâr „an Us}ûl Fakh al-Islâm al-Bazdawiy, Vol. II, (T.K: Maktab S}anâi‘, 1307 H), 96.

<sup>54</sup> Lajnah min Asatidhah Qism al-Fiqh bi Kulliyat al-Syari‘ah wa al-Qanun, *Qawâid al-Fiqh al-Islâmiy bain al-Naz}ariyyah wa al-Tat}bîq*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2007), 188.

<sup>55</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Mas}âdir al-Tasyrî‘ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}s}a Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî‘, Cet. 6, 1993), 147



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.<sup>56</sup> Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.<sup>57</sup> Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan (ikhtilâf lafzîy) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

## 2. Syarat-Syarat Urf

Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa „urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan suatu hukum syara“ jika memenuhi syarat berikut:

- a. Urf itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya „urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat itu
- b. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ;urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya
- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua

<sup>56</sup> Ibnu Amir al-Hajj, al-Taqrîr wa al-Tah}rîr „alâ Tah}rîr Ibn al-Humâm fî „Ilm al-Us}ûl: al-Jâmi“ baina Is}t}ilâhay al-H}anafîyyah wa al-Syâfî“îyyah, Vol. I, (Mesir: al-Mat}ba‘ah al- Amîriyyah, 1316 H), 182; Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-„Urf..., 34.

<sup>57</sup> Abdul Haq, et al., Formulasi Nalar Fiqh, (Surabaya: Khalista, 2006), 274

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak telah menentukan secara jelas hal hal yang harus dilakukan.

- d. „Urf itu tidak bertentangan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bias ditetapkan. „Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara“, karena kehujjahannya bias diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>58</sup>

Umunya „Urf yang sudah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafi menempatkannya sebagai dalil dan mendahuukannya atas *qias* yang disevut *istihsan* „urf. Golongan malikiyah menerima „urf terutama „urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan ulama syafi“iyah.<sup>59</sup>

### 3. Macam-macam Urf

Dari segi objeknya, „urf dibagi menjadi dua macam<sup>60</sup>, yaitu „urf lafz}iy atau qauliy (verbal custom) dan „urf „amaliy (actual custom). „Urf lafz}iy adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan,

<sup>58</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (cet I, Jakarta: Amzah, 2005). 334.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin. Garis-garis Besar Ushul Fiqh (Cet I Jakarta, Kencana, 2012) 74-75

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin. Garis-garis Besar Ushul Fiqh (Cet I Jakarta, Kencana, 2012) 74-75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Adapun „urf „amaliy (actual custom) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-a“mâl al-„âdiyah (kebiasaan)<sup>61</sup>, atau muamalah keperdataan seperti bay“ mu“ât}ah,<sup>62</sup> kredit, upah, kebiasaan hari libur kerja, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari segi cakupannya, „urf dibagi dua macam juga, yaitu: „urf „âmm (general custom) dan „urf khas} (special custom). „Urf „âmm (general custom) adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Contohnya: memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita. Sementara „urf khas} (special custom) adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Contohnya, mengadakan halalbihalal yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap hari raya Idul Fitri.

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak, „urf dibagi menjadi dua kategori,<sup>63</sup> yaitu: „urf s}ah}îh} (valid custom) dan „urf fâsid

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhailiy, Us}ûl al-Fiqh al-Islâmiy, Vol. II, 107.

<sup>62</sup> Yang dimaksud al-a“mâl al-„âdiyah atau perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat keseharian yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti makan dan minum.

<sup>63</sup> Adalah proses jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli. Padahal menurut syarak, pengucapan akad jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, mereka melakukan jual beli tanpa melakukan hal itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(invalid custom). „Urf s{ah}îh} (valid custom) adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya,<sup>64</sup> tidak membatalkan yang wajib,<sup>65</sup> serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan).<sup>66</sup> Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara; dengan kontan ataupun dengan utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syarak, maka ia boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum. Adapun „urf fâsid (invalid custom) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram<sup>67</sup> atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya.

---

dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syarak membolehkannya.

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 109.

<sup>65</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *„Ilm Usûl al-Fiqh*, 89.

<sup>66</sup> Abdul Karim Zaydan, *al-Wajîz...*, 253

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESEIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi *Meselle aseng* adalah tradisi masyarakat bugis yakni sebelum melangsungkan akad nikah (Ijab dan Qabul) para keluarga terlebih dahulu mendatangi para *sandro* (tokoh masyarakat bugis yang dihargai) untuk melihat *dale'' gello* (nasib baik) kehidupan rumah tangga calon pengantin tersebut terutama dalam melaksanakan akad nikah yang dimulai dengan nama calon mempelai wanita dan laki-laki. Apabila nama tersebut menurut *sandro* akan mendatangkan *dale'' konjak* (nasib buruk) maka *sandro* tersebut akan *maselle aseng* (mengganti nama) calon mempelai yang diduga akan mendatangkan *dale'' konjak* (nasib buruk) dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Tetapi perubahan nama tersebut hanya dilakukan ketika akad nikah (Ijab dan qabul) saja. Proses ini dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah, atau setelah dilakukan proses adat sebelum menikah yakni *mependre doi''*
2. Tradisi *meselle aseng* dalam hukum islam terdapat dalam konsep *urf''* dimana tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sudah berjalan lama dan ajek dalam masyarakat tentunya bentuk dari kearifan lokal masyarakat bugis di pualau kijang, kecamatan reteh . Tradisi ini dalam hukum islam adanya hal yang bertolak belakang, karena pelaksanaannya adanya penyelewengan dari syariat islam yakni adanya peramalan nasib kedepannya dan bertentangan dengan keyakinan sesungguhnya rejeki dan musibah segalanya telah diatur

dan sesuai dengan kehendak oleh Allah swt tanpa ada campur tangan siapapun, termasuk *sandro*.

## B. Saran

### 1. Bagi Akademik

Secara keilmuan dan tanggung jawab moral dengan memberikan solusi yang terbaik dengan mengembangkan keilmuan khususnya di bidang syariah perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum islam. Khususnya dalam pernikahan contohnya seperti *meselle aseng* saat ini masyarakat memiliki pandangan yang beragam dengan mengemukakan pendapatnya. Dengan perbedaan tersebut jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan berdampak pada berkurangnya keyakinan atas kekuasaan Allah yang maha mengetahui segalanya, dan atas kehendak ilahi pula.

### 2. Bagi Masyarakat

Dengan demikian secara normatif, tradisi *meselle aseng* dalam hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, antara lain :

- a. Tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah SWT. Syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah SWT. baik segi ibadah maupun mu'amalah.
- b. Memperhatikan kemaslahatan umat Hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi semua manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi *akhlaqul-karimah* dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat, dengan tetap berpegang pada hukum Islam. Karena kedua hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudnya Islam sebagai agama *rahmatun lil,,alamin*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-„Aziz Ahmad bin Muhammad al-Bukhari „Alauddin, Kasyf al-Asrâr „an Us}ûl Fakhr al-Islâm al-Bazdawiy, Vol. II, T.K: Maktab S}anâi“, 1307 H
- Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Ghofur Anshori. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.2011. cet ke-4,
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab tantangan yang Terus Berkembang)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006
- Abdul Haq, et al., *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Mujib. *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*. Surabaya: Danaloka, 1992.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Mas}âdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fimâ Lâ Nas}ja Fihî*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî“, Cet. 6, 1993),
- Abdul Majid Mahmmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Intermedia: Solo, 2005,
- Abdurahamman al-Jaziri. *al-Fiqh „al-Madzhib al-„arba"ah*. Yogyakarta: Pt.Noura, 2001. cet. ke-4
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1990. cet. k-3
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006, cet. ke-1
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta, Kencana, 2012. Cet I
- Amir Syarifuddin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asnida. Mempelai wanita. *Wawancara*. Pulau Kijang, 7 Oktober 2020 pukul 19.00 Wib
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*. Bandung: Sinar Baru, 2010
- Gemala dewi, dkk., *Hukum perikatan islam Indonesia*. Jakarta : kencana, 2005.
- H. Ambo tang. Pemuka Masyarakat dan tokoh agama. *Wawancara*, Pulau Kijang tanggal 23 September 2020 pukul 13.30 Wib
- Harmita Sari, Nurfadilla, UANG PANAI“ Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini).
- Hj Mamma“. Pemuka Masyarakat. *Wawancara*. Pulau Kijang, 19 September 2020, jam 09.00 Wib
- Ibnu Amir al-Hajj, al-Taqrîr wa al-Tah}rîr „alâ Tah}rîr Ibn al-Humâm fî „Ilm al-Us}ûl: al-Jâmi“ baina Is}t}ilâhay al-H}anafiyah wa al-Syâfi“iyah, Vol.
- Imus. Mempelai wanita. *Wawancara*, Pulau Kijang tanggal 7 Oktober 2020 pukul 09.00 Wib
- Jannah. Pemuka Masyarakat. *Wawancara*. Pulau Kijang 23 September 2020 jam 10.00 Wib
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur“an dan Terjemahan*. Bandung: Symsl Al-Qur“an. 2012. cet ke-1
- Lajnah min Asatidhah Qism al-Fiqh bi Kulliyat al-Syari“ah wa al-Qanun, Qawâid al-Fiqh al Islâmiy bain al-Naz}ariyyah wa al-Tat}bîq. Kairo: Universitas al-Azhar, 2007.
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mesir: al-Mat}ba“ah al-Amîriyyah. 1316 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad Sahrur. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Elsaq: Yogyakarta, 2004
- Mustofa Dibbul Bigha. *Fiqh As-Syafi'I*. Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984. cet.ke-7
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000. cet ke-7
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1; Praparae: CV. Kaffah Learning Center, 2019.
- Sayyid M.H.Thabathaba'I. *Hikmah Islam*. Jakarta; Mizan,1993.
- Sidi Gazalba, 1995, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta : Pustaka Antara
- Soedharyo Soimin,. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafik, 2004. cet. ke-12
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty
- Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992. Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta: 1997
- Sudirman, Andi Murniati : Standar Pa"baji" Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kelurahan Pulau Kijang (Tinjauan Maqâsyid Al-Syari"ah) DOI:10.24014
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo:Bandung, 2010
- Syayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UU Press, 1974. Cet Ke-2
- Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. PT. RajaGrafindo Jakarta, 2014
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005. cet I
- Wahbah al-Zuhailiy. *Us}ûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II. Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008.
- Yunus. Pemuka Masyarakat. *Wawancara*. Pulau Kijang 19 September jam 20.00 Wib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TRADISI MESELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DEDI KURNIAWAN**  
 NIM : 11521103979  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SHL, MA**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, M.A**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39065 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34095  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3813/2020 Tanggal 29 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

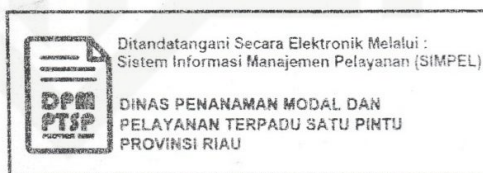
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>DEDI KURNIAWAN</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11521103979</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TRADISI MASELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH MASYARAKAT SUKU BUGIS DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 4.5 Pekanbaru Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 562052 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 0812 777 0852 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : DEDI KURNIAWAN**  
**NIM : 11521103979**  
**JURUSAN : AHWAL AL SYAKHSIYYAH**  
**JUDUL : TRADISI MESELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**Pembimbing: Syukron, SH, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. 1 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-561645 www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TRADISI *MASELLE ASENG* KETIKA AKAD NIKAH MASYARAKAT SUKU  
BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

ditulis oleh saudara : DEDI KURNIAWAN

Nama : Dedi kurniawan  
NIM : 11521103979  
Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 21 April 2020  
Narasumber : Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 22 Juni 2020  
Narasumber

Ade Faris Fahrullah, M.Ag

NIP. 19671112 200501 1 006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU





# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

## REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020/215

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 33/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/34095 Tanggal 20 Juli 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **DEDI KURNIAWAN**  
NIM : 11521103979  
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) / S1  
Alamat : Jl. Impres SD 009 Kecamatan Reteh  
Judul Penelitian : **TRADISI MASELLE ASENG KETIKA AKAT NIKAH MASYARAKAT DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**  
Lokasi Penelitian : **DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 01 September s/d 01 Desember 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

**A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Plt. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,  
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,



**H. MAIZUL, SE, MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640205 199703 1 002

1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## KECAMATAN RETEH

### KELURAHAN PULAU KIJANG

Jl. Sunan Gunung Jati No. 01 Telp. 0768-329017

#### REKOMENDASI

Nomor : 05/REK-PK/IX/2020

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY) UNTUK BAHAN SKRIPSI

Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor: 070/BKBP-EKOSOSBUD/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **DEDI KURNIAWAN**  
 NIM : 11521103979  
 Pangkat Studi/Jenjang : Hukum Keluarga ( Alhwal Syaksyah ) / S1  
 Alamat : Jl. Impres SD 009 Kecamatan Reteh  
 Judul Penelitian : **TRADISI MASELLE ASENG KETIKA AKAD NIKAH MASYARAKAT KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH INDRAGIRI HILIR**  
 Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 01 September s/d 01 Desember 2020.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 03-09-2020

LURAH PULAU KIJANG



Tembusan :

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## RIWAYAT PENULIS



Dedi Kurniawan, lahir di Sanglar pada tanggal 07 Agustus 1996. Penulis merupakan anak kedua dan satu-satunya laki-laki dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Abas dan Ibu Maidah. Penulis mengawali pendidikan di SDN. 009 Pulau Kijang Reteh pada tahun 2004-2009. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN. 2 Pulau Kijang Reteh pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012-2015 penulis melanjutkan pendidikan di MA. Pondok Pesentren Darul Istiqomah Selensen. Penulis melanjutkan study ke Perguruan tinggi yakni di jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 dan berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum pada Tahun 2021.

Email: [Dedik7989@gmail.com](mailto:Dedik7989@gmail.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang  
UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU